

QUO VADIS PERGURUAN TINGGI INDONESIA?

Oleh: Hendra Gunawan*

Dalam buku *"The Great American University"* (New York, 2009), J.R. Cole mengemukakan delapan faktor utama yang menopang kesuksesan perguruan tinggi di Amerika Serikat, yakni: (1) kombinasi pengajaran dan penelitian, (2) otonomi dan kebebasan mimbar, (3) meritokrasi dan sistem kepegawaian (*tenure system*), (4) sistem *peer-review*, (5) kompetisi, (6) influks bakat dari seluruh dunia, (7) *philantrophy*, dan (8) pendanaan Pemerintah. Menarik untuk dianalisis kondisi perguruan tinggi di Indonesia dalam delapan dimensi ini.

Saat ini, terdapat lebih dari 3000 perguruan tinggi di Indonesia, namun sebagian besar (diperkirakan lebih dari 95%) masih terfokus pada pengajaran. Namun ini tidak berarti bahwa pengajaran di perguruan tinggi kita sukses. Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi kita diperkirakan masih berada di bawah 20% (sebagai pembandingan, pada tahun 2007, APK perguruan tinggi Malaysia 32.5%, Thailand 42.7% dan Korea Selatan 91.0%). Rendahnya APK perguruan tinggi sering pula dihiasi dengan berita banyaknya sarjana yang menganggur.

Sementara itu, di era reformasi ini, otonomi perguruan tinggi tetap merupakan kemewahan. Campur tangan Pemerintah masih terlalu banyak --- dalam berbagai aspek. Tengoklah misalnya Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 yang baru-baru ini diundangkan, menyusul pembatalan Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 (tentang Badan Hukum Pendidikan) oleh Mahkamah Konstitusi pada akhir Maret 2010. Perlu diawasi pula RUU Perguruan Tinggi yang saat ini sedang disusun.

Sistem kepegawaian di perguruan tinggi pun masih mencari bentuk. Cobalah hitung berapa banyak perguruan tinggi yang pernah memasang iklan lowongan dosen di media massa. Profesi dosen di Indonesia saat ini masih merupakan profesi "bisik-bisik". Sistem *peer-review* juga belum terbentuk. Tiap dosen sibuk dengan urusannya sendiri. Hanya mereka yang memang ditugaskan lah yang sesekali menilai sejawatnya, dengan instrumen yang rapuh dan kadar *ewuh pakewuh* yang tinggi. Kompetisi hanya terjadi untuk memperebutkan proyek dan jabatan struktural. Barangkali hanya di Indonesia pemilihan Rektor dan Dekan disertai dengan hiruk-pikuk tim sukses, kampanye dan pemilu, seperti pemilihan Bupati saja.

Juga dapat dihitung dengan jari banyaknya perguruan tinggi di Indonesia yang memiliki mahasiswa asing. Bahkan urusan ijin tinggal untuk mahasiswa asing pun belum dipikirkan dengan baik oleh Pemerintah, kecuali pada Juni 2010 ada surat dari Dirjen Imigrasi kepada Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengenai ijin tinggal terbatas bagi mahasiswa asing, yang lebih luwes dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, bagaimana prakteknya di lapangan, masih perlu ditelusuri.

Bila *philantrophy* masih merupakan makhluk langka di negara kita, bagaimana dengan pendanaan dari Pemerintah? Disamping pendanaan rutin (untuk gaji pegawai dan biaya operasional), tengoklah besarnya dana litbang di negara kita dari tahun ke tahun, yang masih berkutat di bawah 0,1% dari GDP. Sebagai perbandingan, negara-negara tetangga kita menyediakan dana litbang yang jauh lebih besar daripada Indonesia. Menurut catatan Ristek (2009), dana litbang Singapura pada tahun 2006 adalah sekitar 2,36% dari GDP-nya, Malaysia 0,63%, Thailand 0,25%, dan Indonesia 0,06%.

Produktivitas Penelitian

Kecilnya dana litbang berkorelasi positif dengan rendahnya output penelitian perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia. Per 10 Desember 2010, jumlah publikasi yang dihasilkan oleh peneliti dari seluruh perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian di Indonesia yang tercatat di pangkalan data Scimago (<http://www.scimagojr.com>), yang datanya berasal dari Scopus (<http://www.scopus.com>), hanya 9.194 artikel, sementara Singapura 82.159 artikel, Malaysia 41.892 artikel, dan Thailand 29.166 artikel. (Sebagai catatan, Scopus dipakai sebagai acuan dalam pemeringkatan perguruan tinggi skala dunia.)

Mencoba mempelajari lebih jauh seperti apa produktivitas penelitian perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia dan ketiga negara tetangga di atas, penulis – yang kebetulan mempunyai akses ke Scopus – mendapatkan data yang menarik dan perlu untuk kita cermati bersama. Data pertama adalah daftar nama 5 (lima) institusi penyumbang publikasi terbanyak di Indonesia dan ketiga negara tetangga tersebut, beserta jumlah publikasi yang tercatat di Scopus per 8 Maret 2011, sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini.

No.	Singapura	Malaysia	Thailand	Indonesia
1	National University of Singapore (59.290)	University of Malaya (13.133)	Mahidol University (15.896)	Institut Teknologi Bandung (1.686)
2	Nanyang Technological University (32.500)	Universiti Sains Malaysia (9.649)	Chulalongkorn University (12.482)	Universitas Indonesia (1.414)
3	Singapore General Hospital (5.634)	Universiti Putra Malaysia (8.725)	Chiang Mai University (6.084)	Universitas Gadjah Mada (1.001)
4	National University Hospital (4.830)	Universiti Kebangsaan Malaysia (7.194)	Prince of Songkia University (4.163)	Institut Pertanian Bogor (683)
5	Institute for Infocomm Research (4.629)	Universiti Teknologi Malaysia (4.102)	Kasetsart University (3.827)	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (648)

Empat kontributor pertama dari Indonesia adalah perguruan tinggi BHMN (Badan Hukum Milik Negara), yang pada saat ini statusnya sedang dalam masa transisi kembali menuju “perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah” berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010. Perhatikan bahwa produktivitas mereka jauh tertinggal dari perguruan tinggi di Malaysia dan Thailand, apalagi dibandingkan dengan perguruan tinggi di Singapura. Sebagai contoh, Universiti Kebangsaan Malaysia, yang pada tahun 1970-an dibantu oleh sejumlah dosen Institut Teknologi Bandung, saat ini telah menghasilkan publikasi lebih dari empat kali lipat publikasi Institut Teknologi Bandung. Bahkan, bila kita lihat pula tabel di atas, jumlah publikasi total Indonesia ternyata lebih rendah daripada jumlah publikasi *sebuah* University of Malaya saja.

Negara tetangga yang produktivitas penelitiannya kurang lebih seperti Indonesia adalah Filipina. Daftar 5 (lima) institusi penyumbang publikasi terbanyak di Filipina adalah International Rice Research Institute (2.580), University of the Philippines Diliman (1.664), University of the Philippines Los Banos (1.482), University of the Philippines Manila (1.022), dan De La Salle University (625).

Data di atas tentu sangat menyedihkan. Data berikutnya, yang juga diperoleh dari Scopus, adalah daftar seratus sekian perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Indonesia yang telah berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Lima institusi teratas adalah ITB, UI, UGM, IPB dan LIPI, sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Urutan ke-6 s/d ke-10 ditempati oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (497), US Naval Medical Research Unit No. 2 (415), Fakultas Kedokteran UI (360), Universitas Airlangga (325), dan Universitas Diponegoro (311). Selanjutnya pada urutan ke-11 s/d ke-20 terdapat Kementerian Kesehatan RI, Universitas Padjadjaran, Universitas Hasanuddin, Institut Teknologi Sepuluh November, Universitas Udayana, Balai Pengkajian & Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Universitas Brawijaya, dan Universitas Andalas, dengan jumlah publikasi masing-masing berkisar antara 130 dan 300. Perguruan tinggi swasta penyumbang publikasi terbanyak di Indonesia adalah Universitas Trisakti, yang berada di urutan ke 28 dengan 93 publikasi per 8 Maret 2011.

Apa Selanjutnya

Tentu tidak semudah membalik telapak tangan untuk memperbaiki situasi di atas. Sebagai salah satu pilar penting dari *the Triple Helix*, perguruan tinggi (dan lembaga-lembaga penelitian) mesti berbenah untuk berkontribusi pada pembangunan. Perguruan tinggi yang berkualitas tidak hanya menghasilkan sarjana yang cerdas dan berdaya saing tetapi harus juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bangsa melalui pengetahuan dan budaya yang dikembangkannya. Dalam hal ini, beberapa sektor industri strategis di hilir dapat dijadikan pemicu, kemudian dipetakan ilmu dan teknologi serta budaya apa yang harus dikembangkan di perguruan tinggi. Di pihak lain, Pemerintah dan industri tentunya perlu disadarkan untuk mendukung dalam hal kebijakan dan pendanaan.

Sistem kepegawaian dan promosi dosen di perguruan tinggi juga perlu dibenahi, misalnya dengan menerapkan sistem berbasis merit. Jadi bukan karena ingin naik pangkat maka seorang dosen melaksanakan penelitian, tapi karena ia banyak menghasilkan publikasi maka pangkatnya dinaikkan. Terkait dengan sistem promosi, remunerasi dosen tentu harus menjadi perhatian pula. Adanya tunjangan kehormatan bagi para Guru Besar PNS merupakan angin baik, namun yang lebih dinantikan adalah gaji pokok yang memadai untuk seluruh dosen, bukan hanya Guru Besar.

Yang juga tak kalah pentingnya adalah tata pamong dan tata kelola perguruan tinggi, yang berkaitan erat dengan model masyarakat dan budaya akademik seperti apa yang ingin dibangun. Apakah setelah pembatalan Undang-Undang No. 9 tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi, dan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2010 oleh Pemerintah --- yang antara lain mengatur tata kelola perguruan tinggi pasca pembatalan UU No. 9/2009, perguruan tinggi semakin bingung, hanya menunggu RUU Perguruan Tinggi diundangkan, atau justru menyadari pentingnya untuk berbenah dan menentukan arah sambil mengingat kembali misi sejatinya. (23-03-2011)

*Guru Besar pada FMIPA ITB Bandung